

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 14 No. 3 Desember 2021 Hal. 291 - 431

“LOCUS STANDI”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Raden Adha Pamekas, S.Kom., M.Si.
2. Jonsi Afriantara, S.H., M.H.

Penyunting:

1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Sekretariat:

1. Priskilla Siregar, S.Sos.
2. Noercholysh, S.H.
3. Dinal Fedrian, S.IP., M.A.
4. Yuni Yulianita, S.Sos
5. Wirawan Negoro, A.Md.
6. Didik Prayitno, A.Md.

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“LOCUS STANDI”

Pembaca yang budiman, Jurnal Yudisial edisi terakhir di tahun 2021 ini menyajikan beberapa tulisan yang membahas tentang kedudukan hukum suatu pihak dalam satu perkara. Kedudukan hukum awalnya memiliki pengertian terbatas. Namun dengan perkembangan hukum, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi, membuat definisi kedudukan hukum menjadi lebih luas. Bahkan maknanya dapat berbeda sesuai dengan hukum apa yang menjadi landasan suatu permasalahan.

Secara harfiah kedudukan hukum dikenal sebagai *locus standi* dalam bahasa Latin, atau *legal standing* dalam bahasa Inggris, diadopsi dari sistem hukum *common law*. *Legal standing* juga dikenal sebagai *ius standi*, atau *standing to sue*. *Legal standing* lahir karena adanya hubungan hukum alam atau hukum manusia antara sesama manusia dan manusia dengan alam. Pihak yang menjadi *legal standing* di muka pengadilan dapat berupa individu maupun sekelompok orang atau organisasi.

Evan Tsen Lee dan Josephine Mason Ellis dalam *paper* “The Standing Doctrine’s Dirty Little Secret”, menyatakan bahwa kedudukan hukum atau *locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Kedudukan hukum menjadi penting, karena akan memengaruhi suatu proses hukum akan mengarah ke mana. Itulah yang menjadikan dasar Jurnal Yudisial kali ini mengambil tema tentang kedudukan hukum (*locus standi*).

Tiga tulisan awal akan menjabarkan bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, memberikan warna dalam hukum Indonesia. Warna tersebut bukan berarti tanpa perlawanan, seperti bisa dibaca dalam tiga tulisan tersebut. Naskah lain membahas tentang kedudukan hukum pihak ketiga dalam peradilan tata usaha negara. Dua naskah lain membahas tentang pemberian nafkah dalam keluarga. Sedangkan naskah terakhir membahas tentang penyelundupan rokok ilegal.

Ketujuh tulisan yang cukup berwarna tersebut, semoga dapat memberikan kerangka berpikir dan khazanah ilmu pengetahuan yang baru bagi pembaca.

Selamat membaca!

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG	291 - 311
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013	
Antoni Putra	
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta	
MODEL PEMILIHAN SERENTAK DI INDONESIA	313 - 330
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019	
Muhammad Anwar Tanjung	
Derita Prapti Rahayu	
Putri Ade Tami	
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung	
<i>LEGAL STANDING</i> LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGAJUAN PRAPERADILAN	
	331 - 354
Kajian Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel	
Ramiyanto & Silfy Maidianti	
Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang	
KEBERADAAN PIHAK KETIGA WUJUD KEADILAN HUKUM DALAM GUGATAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	
	355 - 374
Kajian Putusan Nomor 41/K/TUN/1994	
Ikhsan Azhar	
Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta	
<i>'UQUBAT</i> TERHADAP JARIMAH ZINA YANG MELIBATKAN ANAK	
	375 - 393
Kajian Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo	
Mansari	
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda, Aceh	
Ahmad Fikri Oslami	
Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Aceh	
Zahrul Fatahillah	
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Aceh, Aceh	

PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI PENELANTARAN RUMAH TANGGA	395 - 411
Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt Fitriani Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan	
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL	413 - 431
Kajian Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH Fitri Wahyuni & Mohd. Rizki Nur Asri Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Riau	

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Putra A (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta)

Surat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Jurnal Yudisial 2021 14(3), 291 - 311

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang putusannya bersifat final dan mengikat, serta sifat berlakunya sesuai dengan asas *erga omnes*. Itu artinya, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi telah tertutup segala bentuk upaya hukum dan harus dipatuhi oleh siapapun, termasuk oleh Mahkamah Agung. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang pada prinsipnya membolehkan peninjauan kembali dilakukan lebih dari satu kali, Mahkamah Agung tidak mematuhinya. Pasca putusan tersebut, Mahkamah Agung justru menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Tulisan ini mengkaji mengenai sifat final dan mengikat serta sifat berlaku sesuai asas *erga omnes* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif dan pembahasannya diawali dengan analisis tentang kepatuhan Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan analisis akibat hukum dari pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa sifat final dan mengikat dari

putusan ini tidak berjalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.

(Antoni Putra)

Kata kunci: final dan mengikat; *erga omnes*; akibat hukum.

Tanjung MA, Rahayu DP & Tami PA (Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung)

Model Pemilihan Serentak di Indonesia

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

Jurnal Yudisial 2021 14(3), 313 - 330

Kajian ini mengeksplorasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 mengenai beberapa model dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak di Indonesia. Fakta pemilu serentak lima kotak suara sebagai model penyelenggaraan pemilu serentak bukanlah satu-satunya gagasan yang berkembang dan diperdebatkan selama perubahan UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945 telah memberikan pilihan model pemilihan serentak di Indonesia. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam kajian ini ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dapat menjadi landasan normatif yang mengarah kepada transformasi pemilihan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan UUD NRI 1945 dan putusan hakim sebagai bahan hukum primer dan hasil penelitian terkait sebagai bahan hukum sekunder. Temuan penelitian ini

<p>menyimpulkan bahwa transformasi pemilihan di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan batasan/defenisi rezim pemilu dan rezim pemilu daerah/lokal. Rezim pemilu berdasarkan UUD NRI 1945 yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Rezim pemilihan daerah/ lokal adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati/wakil bupati maupun walikota/wakil walikota. Landasan normatif menuju transformasi pemilu dan model pemilihan di Indonesia dilakukan dengan penerapan e-rekap, penyederhanaan jumlah partai politik atau penggunaan proporsional tertutup, penataan ulang kelembagaan penyelenggara pemilu, model sosialisasi yang efektif, manajemen logistik, rekrutmen penyelenggara pemilu yang berintegritas, pengawasan dan penegakan hukum pemilu melalui peradilan khusus pemilu.</p> <p>(Muhammad Anwar Tanjung, Derita Prapti Rahayu & Putri Ade Tami)</p> <p>Kata kunci: pemilu lima kotak; pemilihan serentak; peradilan khusus pemilu; uji materiil.</p>	<p>LSM/ORMAS diterima pengadilan sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Rumusan penelitian ini, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut? Apakah penafsiran hakim sudah tepat terkait dengan penentuan <i>legal standing</i> LSM/ORMAS? Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>legal standing</i> LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan ditentukan oleh tiga hal (syarat), yaitu: harus berbadan hukum, mempunyai kepentingan, dan memiliki kegiatan atau usaha nyata. Di antara ketiga hal (syarat) ini, yang menjadi perdebatan adalah mengenai kriteria kepentingan. LSM/ORMAS menurut hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid/Prap/2017/PN.Jkt/Sel harus memiliki kepentingan dan tujuan tertentu serta ada kesamaan dengan perkara yang diajukan praperadilan. Kriteria tersebut tidak digunakan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt. Perbedaan ini disebabkan oleh penggunaan metode penyempitan hukum ketika menafsirkan <i>legal standing</i> LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan.</p> <p>(Ramiyanto & Silfy Maidianti)</p> <p>Kata kunci: <i>legal standing</i>; lembaga swadaya masyarakat; organisasi masyarakat; praperadilan.</p>
<p>Ramiyanto & Maidianti S (Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang)</p> <p><i>Legal Standing</i> Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengajuan Praperadilan</p> <p>Kajian Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt dan Nomor 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(3), 331 - 354</p> <p>Praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana di Indonesia saat ini dapat diajukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan harus memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan masyarakat yang diwakili, yaitu memperjuangkan kepentingan umum. Pada tataran praktis, tidak semua pengajuan praperadilan oleh</p>	<p>Azhar I (Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta)</p> <p>Keberadaan Pihak Ketiga Wujud Keadilan Hukum dalam Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara</p> <p>Kajian Putusan Nomor 41/K/TUN/1994</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(3), 355 - 374</p> <p>Keberadaan pihak ketiga sebagai pihak pengaju gugatan perkara tata usaha negara merupakan wujud keadilan yang tidak berkepastian di dalam lingkup hukum tata usaha negara. Dikatakan demikian karena di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang</p>

<p>Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak ditemukan satu norma yang menyebutkan pihak ketiga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Berbagai ketentuan tersebut hanya mengakui seseorang atau badan hukum perdata yang nama tertera di dalam keputusan badan atau pejabat tata usaha yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan tata usaha negara sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan di atas, dilakukan penelitian dengan metode penelitian normatif. Metode penelitian seperti demikian, merupakan metode penelitian yang menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum, dan alat pengumpulan data studi kepustakaan. Dari hasil analisis datanya, diperoleh simpulan majelis hakim Putusan Nomor 41/K/TUN/1994 dapat dikatakan merupakan majelis hakim yang telah memutuskan dengan menerapkan prinsip keadilan. Disebut seperti demikian karena majelis hakim kasasi telah memperluas makna untuk kategori pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan tata usaha negara. Perluasan dalam putusan ini adalah para pihak tidak “hanya” berlaku bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam surat keputusan tata usaha negara, tapi oleh pihak lain (pihak ketiga) yang memang beranggapan bahwa hak-haknya juga dirugikan dengan ditetapkannya surat keputusan tata usaha negara.</p> <p style="text-align: right;">(Ikhsan Azhar)</p> <p>Kata kunci: surat keputusan tata usaha negara; pihak ketiga; keadilan.</p>	<p>Nahdlatul Ulama Aceh, Aceh)</p> <p><i>'Uqubat Terhadap Jarimah Zina yang Melibatkan Anak</i></p> <p>Kajian Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(3), 375 - 393</p> <p>Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo hanya menjatuhkan <i>'uqubat</i> bagi pelaku laki-laki dewasa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan zina dengan anak. Padahal prinsip utama dalam zina adalah adanya dua pihak yang secara suka rela melakukan hubungan intim di luar perkawinan sah. Persoalan utama kajian ini adalah apakah anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo dapat dijatuhkan <i>'uqubat</i> zina, dan mengapa hakim tidak menjatuhkan <i>'uqubat</i> bagi anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berusaha memberikan penilaian terhadap putusan tersebut. Bahan hukum primer yang digunakan Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan menelaah literatur perpustakaan. Analisis data dilakukan secara preskriptif dengan tujuan memberikan penilaian terhadap putusan tersebut dengan menggunakan kaidah dan asas-asas dalam ilmu hukum dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo dapat dijatuhi dengan <i>'uqubat</i> hudud, karena terbukti secara suka rela melakukan perbuatan zina, dan anak telah berumur 16 tahun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Alasan hakim tidak menjatuhkan <i>'uqubat</i> bagi pelaku anak dikarenakan beberapa faktor, yaitu: anak dianggap sebagai korban, penuntut umum tidak mengajukan dakwaan dan penuntutan terhadap pelaku anak, dan pengetahuan hakim terhadap otoritasnya untuk meminta penjelasan kepada penuntut umum melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diadili masih kurang.</p> <p style="text-align: right;">(Mansari, Ahmad Fikri Oslami & Zahrul Fatahillah)</p>
<p>Mansari, Oslami AF & Fatahillah Z (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda, Aceh – Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Aceh - Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah</p>	

<p>Kata kunci: qanun hukum jinayat; <i>'uqubat</i>; jinayah; hudud.</p>	<p>terlantar dengan dijatuhi terdakwa pidana. Dampak bagi korban dapat mengalami kekerasan psikologis, yaitu perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas, takut dan bisa berkembang menjadi trauma yang menghalangi dan menghambat aktivitas korban.</p> <p style="text-align: right;">(Fitriani)</p> <p>Kata kunci: penelantaran rumah tangga; mediasi <i>penal</i>; dampak pidana penjara.</p>
<p>Fitriani (Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan)</p> <p>Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Penelantaran Rumah Tangga</p> <p>Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(3), 395 - 411</p> <p>Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku sangat tidak efektif apabila dilihat dari tujuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah penjatuhan pidana penjara kepada pelaku penelantaran rumah tangga dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt dapat menimbulkan dampak bagi korban tindak pidana penelantaran rumah tangga? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku selama tiga bulan dinilai belum tepat. Dalam pertimbangannya hakim belum sepenuhnya melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, dan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu penjatuhan pidana penjara dapat memberikan dampak negatif bagi terdakwa dan korban, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat filosofis, pidana penjara memiliki banyak kelemahan karena sifat pidana penjara membatasi kemerdekaan bergerak. Apabila pelaku dijatuhi pidana penjara maka akan membuat korban semakin terlantar. Seharusnya hakim lebih mengupayakan mediasi dan ganti kerugian, sehingga korban tidak</p>	<p>Wahyuni F & Asri MRN (Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Riau)</p> <p>Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal</p> <p>Kajian Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(3), 413 - 431</p> <p>Penyelundupan rokok ilegal merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara dan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Oleh sebab itu, untuk mencegah perbuatan tersebut, pemerintah kini memberlakukan cukai. Namun pada kenyataannya upaya itupun tidak mampu membendung terjadinya penyelundupan rokok ilegal. Hal ini terbukti dari kasus penyelundupan rokok ilegal yang masih kerap terjadi sekalipun bagi pelakunya telah diterapkan sanksi pidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis penerapan sanksi terkait tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal dalam Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH, dan apa strategi hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana penyelundupan rokok ilegal agar kepastian dan keadilan hukum terwujud. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengolah data sekunder dengan bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan relevan lainnya. Analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa secara yuridis penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal dalam</p>

perkara tersebut, yaitu berupa pidana penjara satu tahun enam bulan, masih tergolong ringan dan belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku, serta masyarakat pada umumnya. Dengan demikian diperlukan rumusan sanksi pidana yang maksimal oleh hakim dan pidana yang lebih berat bagi pelaku. Selain itu, hakim juga harus memiliki strategi dalam menjatuhkan putusan melalui pertimbangannya yang terdiri atas aspek yuridis dan non-yuridis. Hakim tidak boleh hanya condong pada aspek yuridis tetapi juga perlu memperhatikan aspek non-yuridis agar terhindar dari kesalahan dan pereayasaan dalam memeriksa perkara dan menerapkan sanksi terhadap terdakwa.

(Fitri Wahyuni & Mohd. Rizki Nur Asri)

Kata kunci: penyelundupan rokok illegal; perbuatan melawan hukum; aspek yuridis; non-yuridis.

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Putra A (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta)

Final and Binding Nature of the Constitutional Court's Decision in Judicial Review

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2021 14(3), 291 - 311

The Constitutional Court is a judicial body with the authority to conduct judicial review of the 1945 Constitution. Its decisions are final and binding and apply according to the principle of erga omnes. That means, the Constitutional Court's decision is closed to all forms of legal remedies and is enforced for anyone, including the Supreme Court. However, the Supreme Court did not comply with the Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 which essentially allowed the extraordinary request for case review to be carried out more than once. After the decision was made, the Supreme Court instead issued a Supreme Court Circular Number 7 of 2014 concerning the Submission of Extraordinary Requests for Review in Criminal Cases, stating that request of case review in criminal cases are limited to one time only. This has created confusion for law enforcement officials and justice seekers. This analysis observes the final and binding nature as well as the conformity of the erga omnes principle from the decision of the Constitutional Court Number 34/PUU-XI/2013. The research was conducted using a normative research method and the discussion begins with an analysis of the Supreme Court's compliance with the decision, followed by an analysis of the legal consequences of neglecting the Constitutional Court's Decision Number 34/PUU-XI/2013. Therefore, it can be concluded that the final and binding nature of this decision is not effective, causing legal uncertainty.

(Antoni Putra)

Keywords: final and binding; erga omnes; law effect.

Tanjung MA, Rahayu DP & Tami PA (Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung)

The Simultaneous Election Model in Indonesia

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2021 14(3), 313 - 330

This study explores the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 regarding several models in holding general elections and simultaneous elections in Indonesia. The fact that the simultaneous election of five ballot boxes as a model for simultaneous elections is not the only idea that has developed and been debated during the amendment to the 1945 Constitution. The Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 on the Judicial Review of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has provided a choice of simultaneous election models in Indonesia. Therefore, the formulation of the problem in this study is how the judges' considerations in the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 can be a normative basis that leads to the transformation of elections in Indonesia. This study uses a normative legal method with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the judges' decisions as primary legal sources and the relevant research results as secondary legal sources. From the results of this study, it can be concluded that the electoral transformation in Indonesia is carried out by taking into account the boundaries/ definitions of the electoral regime, and the regional/ local election regime. The election regime is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,

<p>which includes the elections for the President and Vice President, DPR, DPD and DPRD. Regional/local election regimes cover the election of governors and deputy governors and regents/deputy regents as well as mayors/deputy mayors. The normative basis for the transformation of elections and electoral models in Indonesia is carried out by implementing e-recap, simplifying the number of political parties or using closed proportional, reorganizing election management institutions, implementing effective socialization models, logistics management, recruitment of election organizers of integrity, supervision and law enforcement through a special election court.</p> <p>(Muhammad Anwar Tanjung, Derita Prapti Rahayu & Putri Ade Tami)</p> <p>Keywords: election of five ballot boxes; simultaneous election; special election court; judicial review.</p>	<p>research's formulation of problem includes: what are the judge's considerations in the two decisions? Is the judge's interpretation on the determination of the NGOs or public organizations legal standing applicable? This research is classified as normative legal research using secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the legal standing of NGOs or public organizations in pretrial submissions is determined by three preconditions, which include having to be a legal entity, having an interest, and having real activities or businesses. Among the three, what is at issue is the criteria of interest. The NGOs or public organizations according to Court Decision Number 111/Pid/Prap/2017/PN.Jkt/Sel must have certain interests/goals and similarities to the cases submitted in the pretrial. However the judges did not put this criteria into practice in Court Decision Number 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt. This difference arises because of the legal narrowing method used when interpreting the legal standing of NGOs or public organizations in pretrial submissions.</p> <p>(Ramiyanto & Silfy Maidianti)</p> <p>Keywords: legal standing; non-governmental organization; public organization; pre-trial.</p>
<p>Ramiyanto & Maidianti S (Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang)</p> <p>The Legal Standing of Non-Governmental Organizations or Public Organizations in a Pre-Trial Submission</p> <p>An Analysis of Decision Number 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt and Number 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(3), 331 - 354</p> <p>Pretrial for termination of investigation or prosecution of criminal cases in Indonesia at this time can be submitted by Non-Governmental Organization (NGO) or public organizations acting as interested third parties. According to the Constitutional Court's Decision Number 98/PUU-X/2012, NGOs or public organizations that apply for pretrials must have the same interests and goals as the people represented, which is to fight for the public interest. On a practical level, not all pretrial submissions by NGOs or public organizations are accepted by the court as seen in the Court Decision Number 1/Pid.Prap/2019/PN.Skt and Number 111/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. This</p>	<p>Azhar I (Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta)</p> <p>Third Party as the Manifest Legal Justice in a State Administrative Court Lawsuit</p> <p>An Analysis of Decison Number 41/K/TUN/1994 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(3), 355 - 374</p> <p>A third party who files a lawsuit in a State Administration case is a form of uncertainty in justice within the scope of State Administration Law. This is because in the provisions of Article 55 of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, Article 1 number 3 of Law Number 5 of 1986 in conjunction with Article 1 point 9 of Law Number 51 of 2009, Article 1 point 4 of Law Number 5 of</p>

<p>1986 in conjunction with Article 1 number 10 of Law Number 51 of 2009, and Article 53 paragraph (1) of Law Number 5 of 1986, there is not a single norm affirming that third parties could file a lawsuit to the state administrative court. These various provisions only recognize a person or civil legal entity listed in the state administrative decree who is impaired as the party entitled to file a lawsuit to the administrative court. A normative research method was used to elaborate the problems. This method explores secondary data in the form of legal materials, and reference library research data collection tools. The data analysis draws a conclusion that the panel of judges in Decision Number 41/K/TUN/1994 are assumed to be a panel of judges that has decided on the principle of justice. It is for the reason that the cassation panel of judges has expanded the meaning to the category of parties who feel aggrieved by the state administrative decree. The expansion in this decision is that the parties do not “only” apply to the parties mentioned in the state administrative decree, but by other parties (third parties) who consider their rights are also impaired by the issuance of the state administrative decree.</p> <p style="text-align: right;">(Ikhsan Azhar)</p> <p>Keywords: state administrative decree; third party; justice.</p>	<p>parties outside of legal marriage. The main issue of this study is whether the girl in Decision Number 02/JN/2018/MS.Mbo can be imposed of an adultery ‘uqubat and why the judge didn’t impose the ‘uqubat for the girl in Decision Number 02/JN/2018/MS.Mbo. The author uses a normative juridical research method to assess the decision. The Decision Number 02/JN/2018/MS.Mbo is the primary legal material. The secondary legal materials were acquired by reviewing library literature. The data were analyzed prescriptively, intending to assess the decision using the rules and principles in the science of law and Islamic law. The study results show that the girl in Decision Number 02/JN/2018/MS.Mbo can be sentenced with ‘uqubat hudud because it was proven that she voluntarily committed adultery. The girl is 16 years old and can be asked for responsibility for her actions. The judges did not impose ‘uqubat for the girl due to several factors, namely: the girl was considered as a victim, the prosecutor didn’t submit an indictment and criminal charge against the girl, and a lack of the judge’s knowledge of their authority to ask for an explanation to the public prosecutor in carrying out investigations and prosecutions for the cases that related to the case that was being tried.</p> <p>(Mansari, Ahmad Fikri Oslami & Zahrul Fatahillah)</p> <p>Keywords: qanun jinayat law; ‘uqubat (punishment); jinayah (crime); hudud.</p>
<p>Mansari, Oslami AF & Fatahillah Z (Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda, Aceh – Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, Aceh - Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Nahdlatul Ulama Aceh, Aceh)</p> <p>Punishment on Adultery that Involving Child</p> <p>An Analysis of Decision Number 02/JN/2018/MS.Mbo (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(3), 375 - 393</p> <p>The Decision Number 02/JN/2018/MS.Mbo only imposes ‘uqubat (punishment) for adult male perpetrators who is proven guilty of committing adultery with a girl. Whereas, the main principle of adultery is voluntary sexual intercourse between two</p>	<p>Fitriani (Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan)</p> <p>Imposition of Imprisonment in the Case of Domestic Negligence</p> <p>An Analysis of Decision Number 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(3), 395 - 411</p> <p>According to Article 49 of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, the punishment that may be imposed on perpetrators of criminal cases of domestic negligence is a maximum of 3 (three) years imprisonment or a fine</p>

of up to fifteen million rupiahs. The imposition of imprisonment on perpetrators is so futile, in view of the purpose of Article 4 letter d of the Law. On that basis, the problem formulated in this paper is whether the imposition of imprisonment on the perpetrators of domestic negligence case in Decision Number 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt can lead to a certain impact on the victims. The research method used in this analysis is a normative juridical research method or library research. The results show that the imposition of three months imprisonment on the perpetrators is considered inapt. The facts in the trial sessions and the provisions of Article 4 letter d of the Law on the Elimination of Domestic Violence have not yet been fully well-thought-out by the judges in the consideration. In addition, the imposition of imprisonment can lead to negative impacts on the defendant and the victim, both technically and philosophically. Imprisonment has many drawbacks given that it limits freedom of movement. If the perpetrator is sentenced to prison, the victim will be yet more neglected. The judge should have sought more mediation and compensation, so that the victim was not neglected as a result of the defendant's conviction. The impact on victims includes experiencing psychological violence, such as feelings of being threatened, insecure, unprotected, worried, anxious, and afraid, which can develop into trauma that causes inhibition of the victim's activities.

(Fitriani)

Keywords: domestic negligence; penal mediation; imprisonment impact.

Wahyuni F & Asri MRN (Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Riau)

Juridical View of the Implementation of Sanction Against Illicit Cigarette Trade

An Analysis of Decision Number 234/PID.SUS/2019/PN.TBH (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2021 14(3), 413 - 431

Illicit cigarette trade is an unlawful act that causes

loss of state revenue and creates unfair economic competition. As an effort to prevent this from happening, the government imposes excise duties. Yet, in actual fact it is still powerless to stem the smuggling of illegal cigarettes. This is evidenced by the frequent occurrence of cases of illicit cigarette trade even though the perpetrators have been charged with criminal sanctions. The problem in the analysis is to elaborate the juridical view of the implementation of sanctions aiming to penalize the perpetrators of the criminal act of illegal cigarettes trade in Court Decision Number 234/PID.SUS/2019/PN.TBH, and the judge's strategies in giving a decision on this case as to achieve legal certainty and justice. This study uses normative legal research methods by processing secondary data with primary legal materials and other relevant laws and regulations. The analysis used is descriptive analysis. The study found that judicially the implementation of sanctions for perpetrators of criminal acts of smuggling illegal cigarettes, in this case, a prison sentence of one year and six months, is still relatively light and has not been able to provide a deterrent effect for perpetrators, as well as the public in general. Thus, judges need to formulate maximum criminal sanctions and heavier penalties for perpetrators. In addition, judges must also have a strategy in making decisions through every consideration that consists of juridical and non-juridical aspects. Judges should not only lean on the juridical aspect but also need to pay attention to the non-juridical aspects in order to avoid mistakes and manipulations in examining cases and imposing sanctions.

(Fitri Wahyuni & Mohd. Rizki Nur Asri)

Keywords: illicit cigarette trade; unlawful act; juridical aspects; non-juridical aspects.